

RENCANA STRATEGI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2014 - 2018



DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode (5) lima tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2014 sampai tahun 2018, dan Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan SKPD, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2014-2018.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung, 10 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

SADWOKO HERI SUSATYO,S.E.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601006 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Keputusan Menteri.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang ,tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018.

Tujuan Penyusunan Renstra DPPKAD adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi DPPKAD dalam agenda bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga rencana peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penataan aset daerah dapat terwujud sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
2. Peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 di susun dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.

Selanjutnya dalam kerangka pelaksanaan setiap tahapan dari RPJMD ini maka secara hierarki RPJMD akan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD periode 5 tahunan dan RKPD pada setiap tahunnya, Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, dan renja SKPD pada setiap tahunnya:

1. RPJMD kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD/dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan SKPD, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.
2. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjelasan harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun sebelumnya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya serta maksud dan tujuan.

Bab II. Gambaran pelayanan DPPKAD

Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi DPPKAD, Sumber daya DPPKAD, Kinerja pelayanan DPPKAD, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan DPPKAD.

Bab III. Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini memaparkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKAD, Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung, Telaah Renstra Provinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bagian ini menjelaskan Visi dan Misi DPPKAD tahun 2014 - 2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka panjang menengah DPPKAD, strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab VI. Indikator Kinerja DPPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi DPPKAD pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah terpilih, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

Bab VII. Penutup

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPKAD

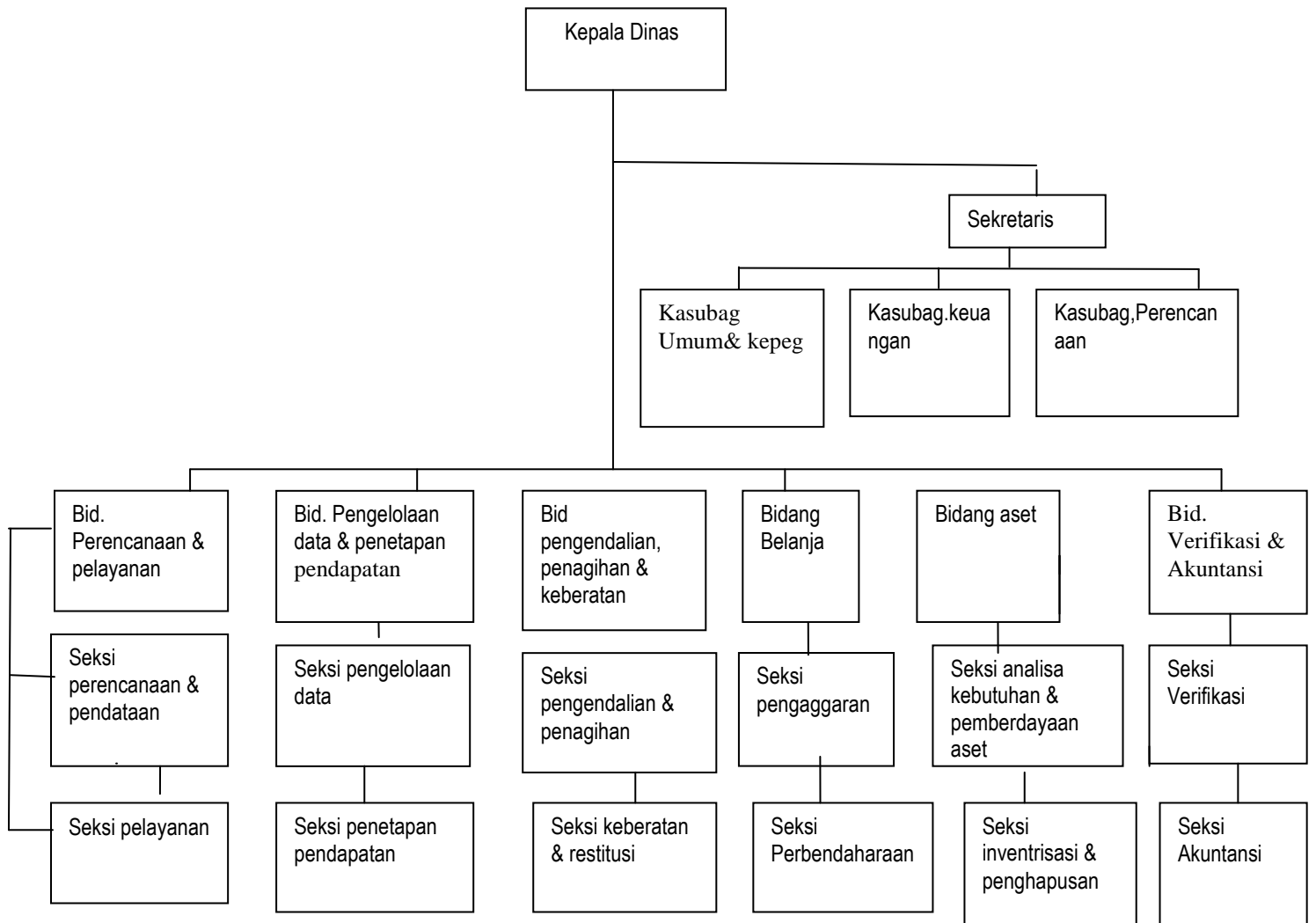
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD).

Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD) mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
- Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- Penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;
- Penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
- Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 1 Struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Temanggung



2.2 SUMBER DAYA DPPKAD

Sumber daya DPPKAD Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Temanggung.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung 56 orang dengan perincian :

| No | Uraian | Jumlah pegawai | Keterangan |
|----|----------------------------|----------------|------------|
| 1 | Kualifikasi Pendidikan | | |
| | a. SD | 3 orang | |
| | b. SMP | 1 orang | |
| | c. SMA | 13 orang | |
| | d. Sarjana Muda (DIII) | 6 orang | |
| | e. S1 / D IV | 19 orang | |
| | f. S2 | 13 orang | |
| | Jumlah | | |
| 2 | Pangkat / Golongan | | |
| | a. Gol I | 3 orang | |
| | b. Gol II | 14 orang | |
| | c. Gol III | 30 orang | |
| | d. Gol IV | 9 orang | |
| | Jumlah | | |
| 3 | Jabatan | | |
| | a. Eselon II | 1 orang | |
| | b. Eselon III | 7 orang | |
| | c. Eselon IV | 14 orang | |
| | d. Eselon V | - | |
| | e. Jabatan Fungsional | | |
| | f. Jabatan Fungsional Umum | | |
| | Jumlah | | |
| 4 | Jenis Kelamin | | |
| | a. Laki – laki | 30 | |
| | b. Perempuan | 26 | |
| | Jumlah | | |
| | Jumlah | 56 orang | |

2.2.2 Sumber Daya Selain Manusia

Berikut ini tabel sumber daya selain manusia di DPPKAD :

Tabel 2.2.2.1 Kendaraan Dinas yang dimiliki DPPKAD Temanggung

| No | Jenis | Kondisi | Jumlah |
|----|--------------|---------|--------|
| 1 | Sepeda Motor | Baik | 57 |
| 2 | mobil | Baik | 8 |

Tabel 2.2.2.2 Perlengkapan / peralatan kantor yang dimiliki DPPKAD

| NO | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|----|---------------------------------------|--------|---------|
| 1 | Televisi | 4 | Baik |
| 2 | Meja Rapat | 1 unit | Baik |
| 3 | Meja dan Kursi Tamu | 6 unit | Baik |
| 4 | Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II | 1 unit | Baik |
| 5 | Tabung Gas | 1 | Baik |
| 7 | Filling Cabinet | 25 | Baik |
| 8 | Papan Tulis | 2 | Baik |
| 9 | Genset | 1 | Baik |
| 10 | Lemari Kayu | 5 | Baik |
| 11 | Filling Cabinet | 30 | Baik |
| 12 | Kursi Kerja | 56 | Baik |
| 13 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 15 | Baik |
| 14 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 15 | Baik |
| 15 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 7 | Baik |
| 16 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 7 | Baik |
| 17 | Kursi Rapat | 4 unit | Baik |
| 18 | Meja Komputer | 35 | Baik |
| 19 | Printer | 25 | Baik |
| 20 | Personal Computer (PC) Unit | 35 | Baik |
| 21 | Faximili | 1 | Baik |
| 22 | Monitor | 35 | Baik |
| 23 | (Air Conditioner) AC Split | 7 | Baik |
| 24 | Alat Pemadam Kebakaran/Portable | 3 | Baik |
| 25 | Mesin Penghisap Debu | 2 | Baik |
| 26 | Rak Buku | 25 | Baik |
| 27 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 10 | Baik |
| 28 | White Board | 8 | Baik |
| 29 | Amplifier | 1 | Baik |
| 30 | Kompor Gas | 1 | Baik |
| 31 | Tempat Sampah | 15 | Baik |

2.2.2.3 Tabel Bangunan

Berikut ini tabel Bangunan DPPKAD

| No | Jenis | Kondisi | Luas |
|----|---|---------|----------|
| 1 | Bangunan Gedung kantor , Tempat Ibadah Permanen | B | 1,158 m3 |

2.3 KINERJA DPPKAD

2.3.1 Capaian Kinerja DPPKAD Tahun 2009 – 2013

Capaian kinerja DPPKAD Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategi dppkad tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi DPPKAD sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKAD
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 - 2013

| No | Indikator kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD | Target Renstra SKPD Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - Rasio = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian}}$ | | | | |
|----|--|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program Penguatan kualitas pengelolaan keuangan dan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Optimalisasi target pendapatan (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Terlaksananya standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam pengelolaan keuangan daerah | 83 skpd | 83 skpd | 83 skpd | 83 skpd | 83 skpd | 83 skpd | 83 skpd | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd | | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd |
| 3 | Terlaksananya pengendalian | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | pelaksanaan APBD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terwujudnya penyusunan anggaran berbasis kinerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terlaksananya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatn daerah | - | - | 32 skpd Pengelola PAD | 32 skpd Pengelola PAD | 32 skpd Pengelola PAD | - | - | 15 skpd Pengelola PAD | 12 skpd Pengelola PAD | 20 skpd Pengelola PAD | - | - | 32 skpd Pengelola PAD | 32 skpd Pengelola PAD | 32 skpd Pengelola PAD |
| 6 | Pemutkhiran data pendapatan asli daerah (WP/bln) | - | - | 674 wp/bln | 690 wp/bln | 705 wp/bln | - | - | 690 wp/bln | 446 wp/bln | 450 wp/bln | - | - | 690 wp/bln | 446 wp/bln | 450 wp/bln |
| 7 | Terwujudnya administrasi keuangan yang benar (SKPD) | 71 skpd | 71 skpd | 71 skpd | 71 skpd | 71 skpd | 71 skpd | 71 skpd | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd | 81 skpd |
| 8 | Tersusunnya produk hukum daerah tentang APBD (Perda & Perbup) | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup | 3 perda 3perbup |
| | Program penataan dan pencatatan aset daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Optimalisasi pencatatan & penataan aset daerah (Satker) | 80 satker | 140 satker | 140 satker | 140 satker | 140 satker | 71 SKPD | 105 satker | 105 satker | 140 satker | 125 satker | 125 satker | 125 satker | 125 satker | 125 satker | 125 satker |
| 2 | Tersedia dokumen aset yang akuntabel (SKPD) | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD |
| 3 | Tersedianya nilai dan catatan aset yang akurat (SKPD) | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | - | 70 SKPD | 70 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|------------|
| 4 | Terbinanya aparat/pejabat pengelola pengguna dan pengurus barang milik daerah (SKPD) | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD |
| 5 | Terwujudnya efisiensi pemeliharaan aset SKPD (SKPD) | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD | - | - | 71 SKPD | 71 SKPD | 71 SKPD |

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPPKAD Tahun 2009 – 2013

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan DPPKAD melalui pelaksanaan renstra DPPKAD tahun 2009-2013 untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan DPPKAD Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada tabel 2.2

Tabel 2.3.2.

| Uraian | Anggaran Pada tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada tahun ke- | | | | | Rasio Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| Anggaran DPPKAD | 3.971.926.250 | 4.883.069.500 | 4.681.888.300 | 6.357.938.650 | 6.040.957.765 | 3.229.724.123 | 3.919.577.627 | 3.884.034.896 | 5.372.943.518 | 4.992.473.601 | 81,31% | 80,26% | 82,95 | 84,07 | 84,07 | 10%-20% | 10%-20% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2009 – 2013 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di DPPKAD

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DPPKAD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKAD tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

1. Tantangan

- Rendahnya kemampuan dan kemandirian Keuangan Daerah, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah masih rendah.
- Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD pengelola Pendapatan
- Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah
- RKA yang dibuat oleh SKPD masih sering ada yang belum sesuai dengan PPAS
- Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah masih belum terintegrasi
- Dengan software SIAK Akrual yang baru masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan dalam implementasinya
- Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
- Beberapa aset tetap rusak/hilang masih tercatat dalam daftar aset
- Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan dan beberapa kepemilikan aset belum didukung bukti kepemilikan yang sah
- Mewajibkan setiap terjadi mutasi pejabat di SKPD diikuti Berita Acara serah terima barang dan dokumen administrasi keuangan

2. Peluang

- Menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan optimisasi potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah
- Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
- Memperbaiki sistem administrasi pendapatan daerah secara optimal
- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
- Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektifitas, efisien, transparan dan akuntabel
- Perlu meningkatkan pemahaman tentang SAP melalui rapat koordinasi sehingga media rekonsiliasi antar SKPD terpenuhi.
- Meningkatkan pelayanan jasa publik penghasil PAD
- Inventarisasi aset-aset secara cermat dan akurat
- Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
- Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang daerah
- Memberdayakan barang daerah secara tertib, efektif, efisien, dan ekonomis
- Meningkatkan penyediaan sarana-sarana pendukung berkembangnya investasi dan dunia usaha
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses kepemilikan aset daerah

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKAD

Posisi strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam perkembangan kinerja menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada tiap tahunnya baik pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-lain yang sah.

Permasalahan umum yang dihadapi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung antara lain :

1. Belum diketahuinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendekati kondisi riil
2. Sulitnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan
Pengelola pendapatan yang ada di SKPD masih terlambat melaporkan realisasi pendapatan dan data yang dikirim tidak valid
3. Masih adanya peraturan daerah-peraturan daerah pajak maupun retribusi daerah yang sudah tidak sesuai perkembangan dimasyarakat
Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak relevan lagi sehingga perlu direviu atau dikaji ulang.
4. Sistem administrasi pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi (belum menyatu) sehingga sering menimbulkan permasalahan
5. Pengelolaan barang milik daerah belum optimal
Kurangnya koordinasi antara pejabat pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan di SKPD sehingga membuat laporan barang milik daerah SKPD sering terlambat .

| Aspek Kajian | Capaian/kondisi saat ini | Standar yang digunakan | Faktor yg mempengaruhi | | Permasalahan pelayanan SKPD |
|---|---|------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | Internal (kewenangan SKPD) | Eksternal (luar SKPD) | |
| Belum diketahuinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendekati kondisi riil | Menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah | - | SDM yang tersedia kurang memadai | Masih banyak obyek pajak yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak | |
| Sulitnya koordinasi dengan SKPD pengelola | Pengelola pendapatan yang | - | Belum diadakan pendataan wajib | Data yang tersedia tidak | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| pendapatan | ada di SKPD masih terlambat melaporkan realisasi pendapatan dan data yang dikirim tidak valid | | pajak | akurat | |
| Masih adanya peraturan daerah-peraturan daerah pajak maupun retribusi daerah yang sudah tidak sesuai perkembangan dimasyarakat | Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak relevan lagi sehingga perlu direviu atau dikaji ulang. | - | Anggaran untuk pembahasan perda pajak & retribusi daerah belum tersedia | Perlu adanya reviu perda pajak & retribusi daerah | |
| Sistem administrasi pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi (belum menyatu) sehingga sering menimbulkan permasalahan | Adanya sosialisasi tentang pengadiministrasian pengelolaan keuangan daerah | | SDM yang tersedia masih kurang memadai | Sarana prasarana yang tersedia juga belum maksimal | |
| Pengelolaan barang milik daerah belum optimal | Kurangnya koordinasi antara pejabat pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan di SKPD sehingg membuat laporan barang milik daerah SKPD sering terlambat . | | SDM yang tersedia masih kurang memadai | Sarana prasarana yang tersedia juga belum maksimal | |

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2013 - 2018

VISI

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2013 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Motto “ BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG” DAN VISI Kabupaten Temanggung “TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNAGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH’ dengan salah satu Misi “ Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik” merupakan komitmen Bupati Temanggung dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bebas dari korupsi. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM Aparatur, sehingga dapat memberikan pelayanan public yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, dan meningkatkan kualitas pengawasan internal yang dilakukan. Upaya tersebut diatas sekaligus menjadi rangkaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKAD Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor penghambat dan pendorong DPPKAD
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

| NO | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan pelayanan SKPD | Faktor | |
|----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Visi : Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada pelayanan Publik | | | |
| A | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Terbatasnya sdm di skpd | SKPD sering merubah pagu anggaran | Adanya revisi |
| B | Program Pelayanan administrasi perkantoran | Terbatasnya sdm di skpd | Terbatas nya anggaran | Ada nya revisi |
| C | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terbatasnya sdm di skpd | Anggaran yang belum mencukupi | Ada nya revisi |
| D | Program peningkatan disiplin aparatur | Terbatasnya sdm di skpd | Anggaran yang belum mencukupi | Ada nya revisi |
| E | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Terbatasnya SDM di SKPD, masih banyak SKPD yang telat melaporkan keuangan, dan masih banyak SKPD yang belum mengerti `tentang penatausahaan keuangan daerah | Masih banyak SKPD yang belum bisa mengoperasikan software sehingga menjadi penghambat | Ada nya sosialisasi pengoperasian Software tentang keuangan daerah |
| F | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten | Terbatasnya pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan | Terbatasnya SDM | Sosialisasi tentang penyusunan |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | | laporan keuangan daerah |
| G | Program Penataan peraturan Perundang-undangan | Kesulitan dalam penelusuran piutang daerah yang harus di telusuri karena tidak ada by name dan by address | Data yang ada terkadang tidak valid | Adanya kerjasama dan kesadaran antar wajib pajak |
| H | Program Pembinaan dan pengembangan aparatur | Data bagi PTT dan Tenaga kontrak untuk jaminan sosial harus ada klaim | Anggaran kuang | Klaim terbayar |
| I | Program pengelolaan barang milik daerah | Pemahaman tentang penatausahaan pengelolaan barang milik daera masih kurang | SDM yang tersedia tidak mencukupi baik dari pemahaman, SIMBADA maupun inventarisasi barang milik daerah | Adanya pembinaan ke pejabat pengurus |

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis pelayanan DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 dilakukan oleh DPPKAD pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD) Kabupaten Temanggung dengan melibatkan semua kepala bidang, kepala seksi, pejabat fungsional dan beberapa staf. Isu – isu strategis yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah
2. Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan
3. Perekonomian Kabupaten Temanggung yang berbasis agraris atau bukan daerah wisata, industri, dan bisnis, sehingga kurang mendukung pertumbuhan jumlah dan peningkatan penerimaan pajak daerah.
4. Upaya mempertahankan opini WPT atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
5. Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal
6. Software SIAK aktual yang baru masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan dalam implementasinya dikarenakan SDM belum sepenuhnya mengimplementasikan software SIAK
7. Masih banyak SKPD yang melaporkan SPJ dan laporan keuangan terlambat
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal

9. Adanya barang yang mangkrak dan rusak tidak dilaporkan/diserahkan ke pengelola
10. Beragamnya pemahaman pejabat pengurus barang dan/atau pembantu pejabat pengurus barang terhadap kebijakan pengelola barang
11. Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset belum didukung bukti kepemilikan yang sah
12. Beberapa aset tetap rusak/hilang masih tercatat dalam daftar aset.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi DPKAD

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pernyataan Visi DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah ” “TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

” penjelasan dari pernyataan visi adalah sebagai berikut :

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Misi DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran Renstra DPPKAD sebagai berikut **MASIH DIRAPATKAN**

Mrdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

Tujuannya :- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan , perlindungan perempuan dan perlindungan anak

Misi 5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan

Tuju: Meningkatkan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga melalui KB

Sasaran : Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga .

Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Tujuannya : - Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan Nepotisme

- Meningkatkan kualitas perencanaan , evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah

sasaran : - meningkatnya kemampuan , profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur

- meningkatnya kualitas perencanaan , evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD
 Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | |
|-----|--|---|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan Akuntabilitas Aset Daerah | Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah | Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| | | | Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | Rasio pendaptan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | Meningkatnya tertib administrasi aset | Presentase tertib administrasi aset daerah di SKPD | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 |

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPPKAD

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi DPPKAD adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKAD Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3.
Strategi dan kebijakan DPPKAD
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

| VISI : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH | | | |
|---|---|---|---|
| Misi 6. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| | Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah | -Peningkatan kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah - Peningkatan tertib administrasi aset pemerintah daerah | -Meningkatkan kapsitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada aspek pendapatan asli daerah -Meningkatkan tertib administrasi aset yang di miliki daerah |

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

DPPKAD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2014 – 2018 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan pembangunan daerah
 - a. Penyusunan KUA & PPAS
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - h. Penyediaan makan dan minuman
 - i. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
 - j. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
 - k. Jasa pelayanan perkantoran
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Penyusunan DED gedung arsip DPPKAD
 - b. Pengadaan kendaraan dinas.operasional
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pengadaan sarana & prasarana pajak daerah & PBB
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional mantri pajak
4. Program peningkatan disiplin aparatur
 - a. Pengadaan pakian dinas beserta perlengkapannya
5. Program peningkatan & pengembangan pengelola keuangan daerah
 - a. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
 - b. Pengelolaan admistrasi gaji
 - c. Monitoring & evaluasi pendapatan asli daerah
 - d. Stok opname benda/barang berharga (retribusi daerah)
 - e. Percepatan pemasukan PBB dan Intesifikasi Pajak daerah
 - f. Verifikasi dan pengesahan DPA
 - g. Pengelolaan keuangan daerah
 - h. Penyusunan perda dan perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung
 - i. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- j. Verifikasi RKA
 - k. Asistensi penyusunan laporan keuangan
6. Program Pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- a. Penyusunan Raperbup penghapusan piutang daerah
8. Program Pembinaan & pengembangan aparatur
- a. Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja non PNS (bg PTT & Tenaga Kontrak)
9. Program Pengelolaan barang milik daerah
- a. Pengelolaan barang milik daerah
 - b. Analisis kebutuhan & inventarisasi barang milik daerah
 - c. Pemanfaatan & penghapusan barang milik daerah
 - d. Pemeliharaan Simbada

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPPKAD
Kabupaten Temanggung

| M SI | T u j u a n | sasa ran | Program/Kegi atan | Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan | Data capaian pada tahun 2012 | Target kinerja dan kerangka pendanaan | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--|
| | | | | | | 2013 (sesuai APBD 2013) | | | sesuai (DPA SKPD 2014) | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | |
| | | | | | | target | predi ksi capai an | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Me wuj ud ka n pe nin gk ata n pel aks an aa n pe | M en in gk at ka pa sit as ke m a m pen | Men ingk atny a kap asit as kem amp uan keu ang an dan pen | | Persentase anggaran penatausahaa n SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam satu tahun | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Program Perencanaan pembanguna n daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| me rint ah an yg ber sih | pu an ke ua ng an da ah | gelo laan keu ang an daer ah | Penyusunan KUA dan PPAS | Tersusun nya KUA & PPAS | 1 0 0 % | Tersusun nya KUA & PPAS | KUA & PPA S yg telah diset ujui | 59.800.000 | Tersusun nya KUA & PPAS | 59.800.000 | Tersusun nya KUA & PPAS | 70.000.000 | Tersusun nya KUA & PPAS | 70.000.000 | Tersusun nya KUA & PPAS | 75.000.000 | Tersusun nya KUA & PPAS | 75.000.000 |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|

2

P
r
o
g
r
a
m

P
e
l
a
y
a
n
a
n
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i
p

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| | | | a | Pembelian materai, prangko benda-benda pos lainnya | 100% | Tersedia pembelian meterai & benda pos lainnya | Pembelian materai, perangkobenda pos lainnya | 5.000.000 | Pembelian materai, perangkobenda pos lainnya | 5.000.000 | Pembelian materai, perangkobenda pos lainnya | 5.000.000 | Pembelian materai, perangkobenda pos lainnya | 5.000.000 | Pembelian materai, perangkobenda pos lainnya | 5.000.000 |
|--|--|--|---|--|------|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | | d | P e n y e d i a a n a l a t t u l i s k a n t o r | Alat tulis kantor dan kelancaran tugas kantor | 100% | Tersedianya alat tulis kantor | Alat tulis kantor & kelancaran tugas kantor | 23.800.000 | Tersedianya alat tulis kantor | 20.000.000 | Tersedianya alat tulis kantor | 25.000.000 | Tersedianya alat tulis kantor | 25.000.000 | Tersedianya alat tulis kantor | 25.000.000 |
|--|--|--|---|---|---|------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|------|---|--|------------|--|------------|--|------------|---|------------|---|------------|--|------------|
| | | | e | P e n y e d i a a n b a r a n g c e t a k a n & p e n g g a n d a a n | Barang cetakan dan penggand aan dan kelancara n dlm melaksan akan tugas kantor | 100% | Tersed ianya barang cetak an dan pengg andaan | Bara ng ceta kan & peng gand aan | 35.000,000 | Tersedi anya barang cetakan dan pengga ndaan | 37,000,000 | Tersedia nya barang cetakan dan penggan daan | 37,000,000 | Tersedian ya barang cetakan dan penggand aan | 37,000,000 | Pembeli an materai, perangk o benda pos lainnya | 37,000,000 | Tersedia nya barang cetakan dan penggan daan | 37,000,000 |
|--|--|--|---|---|--|------|---|--|------------|--|------------|--|------------|---|------------|---|------------|--|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|--|------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | | f. | P e n y e d i a n k o m p o n e n i n s t a l a s i l i s t r i k , p e n e r a n g a n b a n | Alat-alat listrik kantor & kelancaran dlm melaksanakan tugas | 100% | Tersedia nya alat-alat listrik kantor | Terbeli alat-alat listrik kantor | 4.000.000 | Terbeli alat-alat listrik kantor | 4.000.000 | Terbeli alat-alat listrik kantor | 4.000.000 | Terbeli alat-alat listrik kantor | 4.000.000 | Terbeli alat-alat listrik kantor | 4.000.000 |
|--|--|--|----|---|--|------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|------|--|---|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | | h. | P Makan & eminum n pegawai, y rapat & tamu d i a a n m a k a n a n & m i n u m a n | 100% | Tersedia Makan & minum pegawai , rapat & tamu bulan | Terlak sanan ya Maka n & minu m pega wai, rapat & tamu bulan | 24.981.000 | Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan | 24.516.000 | Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan | 25.000.000 | Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan | 25.000.000 | Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan | 27.000.000 | Tersedia Makan & minum pegawai , rapat & tamu bulan | 27.000.000 |
|--|--|--|-----------|--|------|--|---|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------------|-----------|------|----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| | | I. | J | Pembayara | 100% | Tersedia | Terba | 90.000.000 | Terbayarn | 90.000.000 | Terbayarn | 90.000.000 | Terbayar | 90.000.000 | Terbaya | 90.000.000 |
| | | | a | n gaji | | nya gaji | yarny | | a gaji | | ya gaji | | nya gaji | | rnya gaji | |
| | | | s | penjaga | | penjg | a gaji | | enjg mlm | | enjg mlm | | penjg | | penjg | |
| | | | a | mlm & | | mlm & | penjg | 90.000.000 | | 90.000.000 | | mlm & | | mlm & | mlm & | 90.000.000 |
| | | | P | pembayara | | pembayar | mlm & | | embayar | | pembayar | | pembaya | | pembayar | |
| | | | e | n lembur | | aran | pemb | | n lembur | | an lembur | | ran | | aran | |
| | | | l | pegawai | | lembur | ayara | | pegawai | | pegawai | | lembur | | lembur | |
| | | | a | dppkad | | pegawai | n | | dppkad | | dppkad | | pegawai | | pegawai | |
| | | | y | | | dppkad | lembu | | | | | dppkad | | dppkad | | |
| | | | a | | | | r | | | | | | | | | |
| | | | n | | | | pega | | | | | | | | | |
| | | | a | | | | wai | | | | | | | | | |
| | | | n | | | | dppka | | | | | | | | | |
| | | | P | | | | d | | | | | | | | | |
| | | | e | | | | | | | | | | | | | |
| | | | r | | | | | | | | | | | | | |
| | | | k | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a | | | | | | | | | | | | | |
| | | | n | | | | | | | | | | | | | |
| | | | t | | | | | | | | | | | | | |
| | | | o | | | | | | | | | | | | | |
| | | | r | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a | | | | | | | | | | | | | |
| | | | n | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. Program | | | | | | | | | | | | | |
| | | | peningkatan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | sarana dan | | | | | | | | | | | | | |
| | | | prasarana | | | | | | | | | | | | | |
| | | | aparatur | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|---|------|--|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|
| | | | a. | P e n g a d a n d a n p e r l e n g k a p a n g e d u n g k a n t o r | Meubeleir, pengadaan alat-alat studio pengadaan computer, pembelian CCTV | 100% | Tersedia nya sarana & prasaran a gedung kantor untuk kelancara n tugas | Terbeliny a sarana & prasaran a gedung kantor untuk kelancara n tugas | 155.971.000 | Terbelinya meubeleir & tambang Lift | 120.000.000 | Terbeliny a sarana & prasaran a gedung kantor untuk kelancara n tugas | 100.000.000 | Terbeliny a sarana & prasaran a gedung kantor untuk kelancara n tugas | 100.000.000 | Terbel inya saran a & prasar ana gedun g kantor untuk kelanc aran tugas | 100.000.000 | Ter beli nya sar ana & pra sar ana ged ung kant or unt uk kela ncar an tuga s | 60.000.000 |
|--|--|--|----|---|---|------|--|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | | | b. | Pemeliharaan gedung kantor, kelancaran dlm melaksanakan tugas & terjaganya kenyamanan kantor | 100% | Tersedia nya alat kebersihan kantor | Tersedia nya alat kebersihan kantor | 23.500.000 | Tersedianya alat kebersihan kantor | 23.500.000 | Tersedia nya alat kebersihan kantor | 23.500.000 | Tersedia nya alat kebersihan kantor | 25.000.000 | Tersedianya alat kebersihan kantor | 25.000.000 | Tersedianya alat kebersihan kantor | 25.000.000 |
|--|--|--|-----------|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|-------------|------|--|-------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | d | P | Terpelihara | 100% | | Terpelihara | Terbayar | | | | | | |
| | | | | e | kelengkapan | | | ranya | nya jasa | 6.900.000 | 7000.000 | Terpelihara | 7.500.000 | Terpelihara | 7.500.000 |
| | | | | m | n gedung | | | kelangka | servis | | | nya | 7.500.000 | anya | 8.000.000 |
| | | | | e | kantor | | | pan | genset & | | | kelangka | gedung | pan | 9.000.000 |
| | | | | l | | | | gedung | lift | | | pan | kantor | gedung | |
| | | | | h | | | | kantor | | | | gedung | gedung | kantor | |
| | | | | a | | | | | | | | g | g | kan | |
| | | | | r | | | | | | | | kantor | kantor | gedung | |
| | | | | a | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | a | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | n | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | r | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | u | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | t | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | i | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | n | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | / | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | b | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | e | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | r | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | k | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | a | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | l | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | a | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | p | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | e | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | n | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | g | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | k | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | a | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | p | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | a | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | n | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | g | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | e | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | d | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | u | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | n | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | g | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | k | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | a | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | n | | | | | | | | | | gedung | |
| | | | | t | | | | | | | | | | kan | |
| | | | | o | | | | | | | | | | gedung | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|-------------------------------------|------|-------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | | | e. | P e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a p e r a l a t a n g e d u n g k a n t o r | Terpelihara peralatan gedung kantor | 100% | Terpelihara peralatan gedung kantor | Terbayarnya jasa servis peralatan gedung kantor | 30.000.000 | 30.000.000 | Terbayarnya jasa servis peralatan gedung kant | 30.000.000 | Terbayarnya jasa servis peralatan gedung kant | 30.000.000 | Terbayarnya jasa servis peralatan gedung ka | 30.000.000 | Terbayarnya jasa servis peralatan gedung ka | 30.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | f. | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara pajak | 100% | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara tugas untuk mantri pajak | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara tugas untuk mantri pajak | 20.000.000 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara tugas untuk mantri pajak | 30.000.000 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara tugas untuk mantri pajak | 30.000.000 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara tugas untuk mantri pajak | 30.000.000 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara tugas untuk mantri pajak | 30.000.000 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara tugas untuk mantri pajak | 30.000.000 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan keperluan ancara tugas untuk mantri pajak | 30.000.000 |
|--|--|----|---|------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|---|------|---|---|------------|--|--|---|------------|---|---|---|------------|
| | | | a. | P e n d i n a s b e s e r t a p e r l e n g k a p a n n y a | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 100% | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | Terpakainya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 12.000.000 | | | Terpakainya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 12.000.000 | - | - | Terpakainya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 12.000.000 |
|--|--|--|----|--|---|------|---|---|------------|--|--|---|------------|---|---|---|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------|--|--|
| | | 4. Program peningkatan & pengembangan pengelola keuangan daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a | Penyusunan system informasi keuangan daerah | Terpelihara SIKD 70% | Terpelihara SIKD | SIKD yg siap digunakan 100.000.000 | SIKD yg siap digunakan 25.000.000 | SIKD yg siap digunakan 25.000.000 | SIKD yg siap digunakan 25.000.000 | SIKD yg siap digunakan 25.000.000 | SIKD yg siap digunakan 150.000.000 | SIKD yg siap digunakan 25.000.000 | SIKD yg siap digunakan 25.000.000 | | | |
| | | b | Pengelolaan administrasi gaji | Terpeliharaananya daftar gaji PNS 70% | Tersedianya daftar gaji bg PNS | 200.000.000 | Tersedianya daftar gaji bg PNS 200.000.000 | Tersedianya daftar gaji bg PNS 210.000.000 | Tersedianya daftar gaji bg PNS 210.000.000 | 210.000.000 | Tersedianya daftar gaji bg PNS 210.000.000 | Tersedianya daftar gaji bg PNS 210.000.000 | Tersedianya daftar gaji bg PNS 210.000.000 | 210.000.000 | | |

c Percepatan . pemasukan PBB Intensifikasi pajak daerah

T er la ks an a ny a p e n d a t a a n w a j i b / o b y e k p a j a k d a e r a h , p e n y a m p a i a n S K P D dan

70,97%

Tersedianya pendataan wajib/obyek pajak daerah, penyampaian SKPD dan SPPT PBB, Pemungutan pajak daerah

Tercapainya target pemasukan pajak daerah

448,565,500

Tersedianya pendataan wajib/obyek pajak daerah, penyampaian SKPD dan SPPT PBB, Pemungutan pajak daerah

437,856,000

Tersedianya pendataan wajib/obyek pajak daerah, penyampaian SKPD dan SPPT PBB, Pemungutan pajak daerah

481,641,600

Tersedianya pendataan wajib/obyek pajak daerah, penyampaian SKPD dan SPPT PBB, Pemungutan pajak daerah

529,805,760

Tersedianya pendataan wajib/obyek pajak daerah, penyampaian SKPD dan SPPT PBB, Pemungutan pajak daerah

582,786,336

Tersedianya pendataan wajib/obyek pajak daerah, penyampaian SKPD dan SPPT PBB, Pemungutan pajak daerah

641,064,970

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| | | | dVerifikasi & . pengesahan DPA | DPA yang telah diverifikasi | 75% | DPA yang telah diverifikasi | Tertip administrasi keuangan | 39,930,000 | DPA yang telah diverifikasi | 40,000,000 | DPA yang telah diverifikasi | 45,000,000 | DPA yang telah diverifikasi | 45,000,000 | DPA yang telah diverifikasi | 45,000,000 | DPA yang telah diverifikasi | 45,000,000 |
|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | | e Pengelolaan . keuangan daerah | Terwujudnya peningkatan dan pendapatan daerah | 98% | | Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD | Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD | 2,285,000,000 | Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD | 2,750,000,000 | Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD | 2,800,000,000 | Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD | 3,000,000,000 | Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD | 3,250,000,000 | Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD | 3,500,000,000 |
|--|--|--|---------------------------------|---|-----|--|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|-------------|
| | | f. Penyusunan buku potensi pajak daerah | Meningkatnya pendapatan pajak daerah | Meningkatnya pendapatan pajak daerah | 109,789,600 | Meningkatnya pendapatan pajak daerah | 109,789,600 | - | - | - | - | - | - | Meningkatnya pendapatan pajak daerah | 164,684,400 |
|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|
| | | | g Penyusunan . perda dan pebup tentang APBD Kabupaten Temanggung | T er su su ny a p er d a tt g A P B D, P e r u b a h a n A P B D, d a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n | 78% | Tersedianya perda ttg APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD | Tertip administrasi keuangan | 700,684,500 | Tersedia nya perda ttg APBD, Perubah an APBD dan pertanggun g jawaban APBD | 623,600,000 | Tersedi any a perda ttg APBD, Peruba han APBD dan pertan ggung jawab an APBD | 750,000,000 | Tersedi any a perda ttg APBD, Peruba han APBD dan pertang gun g jawab an APBD | 750,000,000 | Terse diany a perda ttg APBD , Perub ahan APBD dan pertan ggung jawab an APBD | 750,000,000 | Ter sedi any a p er d a ttg AP BD, Per uba han AP BD dan pert ang gun g jaw aba n AP BD | 775,000,000 |
|--|--|--|--|---|-----|---|------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------------------|-----|--|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|
| | | | h Verivikasi . RKA | R K A yang telah di verifikasi | 94% | | RKA yang telah diverifikasi | Tertip administrasi keuangan | 44,825,000 | RKA yang telah diverifikasi | 40,000,000 | RKA yang telah diverifikasi | 50,000,000 | RKA yang telah diverifikasi | 50,000,000 | RKA yang telah diverifikasi | 50,000,000 | RK A yang telah diverifikasi | 50,000,000 |
|--|--|--|--------------------|--------------------------------|-----|--|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| i. Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah | T er l a k s a n a n y a k o o r d i n a s i, m o n i t o r i n g, e v a l u a s i p e n d a p a t a n d a e r a n d a n p e | Tercapainya pendapatan daerah | Tertip administrasi keuangan | 25,000,000 | Tercapai nya pendapat an daerah | 30,000,000 | Tercapainya pendapat an daerah | 30,000,000 | Tercapainya pendapat an daerah | 30,000,000 | Terca painy a penda patan daera h | 30,000,000 | Ter cap ainy a pen dap ata n dae rah | 30,000,000 |
|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|

56%

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|------------|--|------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|
| | | | <p>j. stock pname enda/barang erharga retribusi aerah)</p> | <p>P e m b u k u a n, in ve st as i, & p e l a p o r a n k a r c i s r e t r i b u s i s e s u a i t a r g e t</p> | 50% | <p>Tertibnya pembukuan, investasi & pelaporan karcis retribusi sesuai target</p> | <p>Tertib administra si keuangan</p> | 10,000,000 | <p>Tertibnya pembuku an, investasi & pelapor an karcis retribusi sesuai target</p> | 18,000,000 | <p>Tertibn ya pembu kuan, investa si & pelapor an karcis retribus i sesuai target</p> | 20,000,000 | <p>Tertibn ya pembu kuan, investa si & pelapor an karcis retribus i sesuai target</p> | 25,000,000 | <p>Tertib nya pemb ukuan , invest asi & pelap oran karcis retribu si sesuai target</p> | 30,000,000 | <p>Tert ibny a pe mb uku an, inve stas i & pela por an karc is retri busi ses uai targ et</p> | 30,000,000 |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|------------|--|------------|---|------------|---|------------|--|------------|---|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------------|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| | | | k Pemutakhiran data piutang PBB-P2 | Dat piutang PBB-P2 | 45% | | Tersedianya data piutang PBB-P2 | Tersedianya data piutang PBB-P2 | 49,773,500 | Tersedianya data piutang PBB-P2 | 58,000,000 | Tersedianya data piutang PBB-P2 | 55,000,000 | Tersedianya data piutang PBB-P2 | 50,000,000 | Tersedianya data piutang PBB-P2 | 50,000,000 | Tersedianya data piutang PBB-P2 | 50,000,000 |
|--|--|--|------------------------------------|--------------------|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|--|
| <p>6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</p> | <p>T e r l a k s a n a n y a t e r t i p a d m i n i s t r a s i p e n g e l o l</p> | <p>Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu</p> | <p>Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu</p> | <p>Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu</p> | <p>224,808,500</p> | <p>Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu</p> | <p>225,000,000</p> | <p>Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu</p> | <p>Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|------------|--|-------------|---|-------------|
| | | | b Pembinaan dan pendampingan implementasi system informasi akuntansi keuangan daerah | I n d i c a t o r (o u t p u t) | - | - | | | Terwujud nya sistem administr asi keuanga n daerah yang sesuai SAP | 75,000,000 | Terwuj udnya sistem admini strasi keuan gan daerah yang sesuai SAP | 120,000,000 | Terwujudnya sistem administrasi keuangan daerah yang sesuai SAP | 150,000,000 |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|------------|--|-------------|---|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------|---|---|---|---|---|---|-------------|--|-------------|
| | | | b Pembinaan pejabat pengurus barang | T e r l a k s a n a n y a p e m b i n a a n | 95,52% | - | - | - | - | - | Terlak san an ya p e m b i n a n p e j a b a t p e n g u r u s b a r a n | 100,000,000 | Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang | 125,000,000 |
|--|--|--|---|--|--------|---|---|---|---|---|---|-------------|--|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Penelusuran aset daerah | T e r l a k s a n n y a p e n e l u s u r a n a s e t d i j a r a n d i n a s p e | 92,68% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----|-----|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | | | d Analisis . kebutuhan dan inventaris barang milik daerah | T e r l a k s a n a n y a i n v e n r a t i s a s i b a r a n g m i l i k d a e r a h - | 83% | 95% | 20,000,000 | Terlaksananya invenratisasi barang milik daerah | 19,890,000 | Terlaksananya invenratisasi barang milik daerah | 25,000,000 | Terlaksananya invenratisasi barang milik daerah | 30,000,000 |
|--|--|--|---|---|-----|-----|------------|---|------------|---|------------|---|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | | f. Pemeliharaan simbada | Terpeliharanya program/sistem simbada | - | - | - | - | Terpeliharanya program/sistem simbada | 15,000,000 | Terpeliharanya program/sistem simbada | 50,000,000 | Terpeliharanya program/sistem simbada | 20,000,000 |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
| | | g Penyusutan barang milik daerah | Terlaksanaan biaya penyusutan barang milik daerah | - | - | - | - | Terpeliharanya program/sistem simbada | 300,000,000 | - | - | - | - |
|--|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------|---|---|---|---|

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DPPKAD YANG MENGACU PAD

A TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018

Indikator kinerja DPPKAD kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPPKAD Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA DPPKAD

| NO | INDIKATOR SASARAN | Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|-------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|--|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi DPPKAD Kabupten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2014 - 2018 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKAD.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra DPPKAD kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

LAMPIRAN I

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPPKAD (2013 – 2018

)

Kabupaten Temanggung

| MISI | Tujuan | sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan | Data capaian pada tahun 2012 | T | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | 2013 (sesuai APBD 2013) | | | sesuai (DPA SKPD 2014) | | |
| | | | | | | target | prediksi capaian | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik | Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme | Meningkatnya kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur | | Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam satu tahun | | | | | | | |
| | | | 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran | | | | | 255,796,600 | | 300,227,500 | |
| | | | a | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Meningkatnya komunikasi, listrik & air untuk menunjang terselenggaranya kegiatan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 16,992,000 | 12 bulan | 19,990,000 |
| | | | b | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | terpeliharanya sarana dan prasarana kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 2,000,000 | 12 bulan | 2,300,000 |
| | | | c | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | terpeliharanya kebersihan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 3,000,000 | 12 bulan | 3,450,000 |
| d | Penyediaan alat tulis kantor | terpenuhinya kebutuhan administrasi | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 22,022,100 | 12 bulan | 23,500,000 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| | | | perkantoran | | | | | | | |
| | | e | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | perkantoran terutama barang cetak dan foto copy data | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 8,000,000 | 12 bulan | 9,200, |
| | | f | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | terpeliharaan alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 2,000,000 | 12 bulan | 2,000, |
| | | g | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan | tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan pegawai | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 1,800,000 | 12 bulan | 2,070, |
| | | h | Penyediaan makanan & minuman | tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 9,993,500 | 12 bulan | 10,997,0 |
| | | i | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 39,995,000 | 12 bulan | 42,495,0 |
| | | j | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah | terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 134,995,000 | 12 bulan | 135,995,000 |
| | | k | Jasa pelayanan perkantoran | terselenggaranya kegiatan administrasi kantor | 13 bulan | 13 bulan | 13 bulan | 14,999,000 | 13 bulan | 48,216,5 |
| | | 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | 989,900,000 | | 150,000,000 |
| | | a | Pembangunan dan rehab | tersedianya aula dan garasi | - | 1 Gedung | 1 Gedung | 849,930,000 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|------------|------------|
| | | | Gedung Kantor | | | | | | |
| | | | b Pengadaan peralatan gedung kantor | tersedianya peralatan gedung kantor | <i>Terbelinya 4 buah meja kerja dan 1 buah bendera merah putih</i> | terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 59,970,000 | 60,000,000 |
| | | | c Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Meningkatnya kenyamanan & keamanan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 15,000,000 |
| | | | d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Meningkatnya mobilitas kelancaran pelaksanaan tugas | <i>Service kendaraan roda 4, 6 kali, Body kit 12 kali, body repair 1 unit, belanja BBM dan perpanjangan STNK 3 Mobil, 96 motor</i> | <i>Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56</i> | <i>Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56</i> | 70,000,000 | 75,000,000 |
| | | | 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | 4,299,900 | 4,944,000 |
| | | | a Penilaian angka kredit | terfasilitasinya penilaian | 2 smter | 2 smter | 2 smter | 4,299,900 | 4,944,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---|--|-------------|-------|---|-------|-------------|-------------|
| | | | | angka kredit Penyuluh KB | | | | | | | |
| | | | | 4. Program peningkatan disiplin aparatur | | | | | - | | 23,000 0 |
| | | | a | Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu | terpenuhinya fasilitas pakaian dinas pegawai | 123 pegawai | - | - | - | 123 pegawai | 23,000 0 |
| | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah | | 1. Program perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | |
| | | | a | Kegiatan Penyusunan oleh perencanaan SKPD | tersusunnya Lakip, PK, LPPD, AMJ, dan Rekapitulasi data SKPD | - | - | - | - | - | - |
| Mewujudkan budaya sehat dan aksesibilitas kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui KB | Meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga | | Meningkatnya kualitas kesejahteraan Keluarga | | | | | | | |
| | | | a. | Keluarga Pra Sejahtera | 22.86 | 21.32 | 21.32 | | 21.32 | | |
| | | | b. | Keluarga Sejahtera I | 11.3 | 8.05 | 8.05 | | 8.05 | | |
| | | | c. | Keluarga Sejahtera II | 17.33 | 21.81 | 21.81 | | 21.81 | | |
| | | | d. | Keluarga Sejahtera III | 45.38 | 45.57 | 45.57 | | 45.57 | | |
| | | | e. | Keluarga Sejahtera III plus | 3.11 | 3.23 | 3.23 | | 3.23 | - | |
| | | | | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | 100% | 100% | 100% | | 100% | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|------------|---------|--------|
| 1. Program pembinaan kesejahteraan keluarga | | | | | 44,999,000 | | 70,000 |
| a Kegiatan Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan | <i>Tersedia hasil pendataan 25 buku /th & 24 Buku umpan balik / bulan</i> | 49 buku | 49 buku | 49 buku | 44,999,000 | 49 buku | 70,000 |
| | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun | 4% | 3% | 3.25% | | 3.10% | |
| | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif | 83,02 % | 84% | 83% | | 83.20% | |
| | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) | 7,55 % | 7% | 6% | | 5.70% | |
| | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB | 80,58 % | 80,89 % | 81% | | 81.05% | |
| | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB | 84,52 % | 84,99 % | 85% | | 85.50% | |
| | Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 5 | | 1 : 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|---------------|------------|-----------|------------|
| | KB Per Desa atau Kelurahan | | | | | | | |
| | Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan | 100% | 100% | 100% | | 100% | | |
| | Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria | 2,89 % | 3% | 3% | | 3.20% | | |
| | Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk | 0,67 % | 0,7 % | 0,67 % | | 0.65% | | |
| | Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru | 19428 | 17274 | 14073 | | 14065 | | |
| | 1. Program Keluarga Berencana | | | | 1,249,642,900 | | 1,489,660 | |
| a | Kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) | Peningkatan pengetahuan terhadap program KB | 40 Kali | 40 Kali | 40 Kali | 24,850,000 | 40 Kali | 30,000,000 |
| b | Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan | Rapat Koordinasi Kepala UPT Kecamatan, Rakorcam, Rakordes masing-masing 4 kali dan Rakorda 1 kali rapat tengah tahunan | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 59,823,000 | 12 kali | 114,900 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------|-----------|
| | | | | c | Kegiatan Pengadaan Sarpras KB (DAK) | tersedianya peralatan KB | <i>Terbelinya Implant KIT 4 unit, dan Obgyn bed 4 unit, Komputer 5 unit, KIE KIT 51 unit, sarana kerja PLKB 70 unit</i> | terbelinya tempat sampah 2, almari 10, filling kabinet 4, whiteboard 2, kipas angin 6, komputer 6, software 6, printer 6, meja kompter 6, ups 6, modem 6, meja kerja 14, kursi kerja 150, tabung gas 2, kompor 2, gordin 2, gedung 2 bh, obgyn bed 57, iud kit 58 | terbelinya tempat sampah 2, almari 10, filling kabinet 4, whiteboard 2, kipas angin 6, komputer 6, software 6, printer 6, meja kompter 6, ups 6, modem 6, meja kerja 14, kursi kerja 150, tabung gas 2, kompor 2, gordin 2, gedung 2 bh, komputer | 960,680,000 | 1,017,500 |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------|--|---------|
| d | Kegiatan Pendampingan DAK Pengadaan Sarpras KB | tersedianya peralatan KB | Terbelinya Implant KIT 4 unit, dan Obgyn bed 4 unit, Komputer 5 unit, KIE KIT 51 unit, sarana kerja PLKB 70 unit, obgyn bed 57, iud kit 58 | iud kit 58, obgyn bed 57, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh | iud kit 58, obgyn bed 57, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh | 124,284,000 | komputer, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh | 139,100 |
| e | Kegiatan Pembangunan balai penyuluhan KB (DAK) | tersedianya UPT KB | 2 unit | - | - | - | - | - |
| f | Kegiatan Pendampingan DAK (Pembangunan balai penyuluhan KB) | tersedianya UPT KB | 2 unit | - | - | - | - | - |
| g | Kegiatan Kegiatan Pertemuan Medis Teknis | terlaksananya kegiatan BKBPP | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,575,000 | 1 Kegiatan | 5,500, |
| h | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KB dan PP | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bagi Pelaksana dan Pengelola Program KB & KR (bidan dan PKB) | 20 upt, 2 kegiatan | 20 upt, 2 kegiatan | 20 upt, 2 kegiatan | 8,999,950 | 20 upt, 2 kegiatan | 9,919, |
| i | Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat | Meningkatnya peserta KB sebanyak | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 23,874,950 | 1 Kegiatan | 29,990 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | at/ Institusi/ Lembaga | 400 akseptor | | | | | | |
| j | Pengembangan dan Pemantauan Program | Meningkatnya pembinaan bagi kelompok catur bina keluarga | 12 kelompok | 12 kelompok | 12 kelompok | 42,556,000 | 12 kelompok | 42,556,000 |
| k | Pembangunan Jaringan online dengan UPT Kecamatan/ SKPD | - Pengadaan peralatan online '- Pelatihan operator | - | - | - | - | - | 99,990 |
| 2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | | | | | | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| a | Kegiatan sosialisasi KRR dan KHIBA | - Meningkatkan pengetahuan tentang KRR bagi PIK Remaja (konselor Sebaya) | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,500,000 | 1 Kegiatan | 4,500,000 |
| 3. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS | | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| a | Kegiatan Pertemuan penyuluh penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS | Meningkatnya pengetahuan tentang narkoba, PMS bagi Pelaksana dan Pengelola PIK Remaja dan Pengurus OSIS | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 10,000,000 | 2 Kegiatan | 10,000,000 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 4. Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU | | | | | | 303,500,000 | | 378,600,000 |
| a | Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Kelompok BKB | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi kelompok KB | | | | | | |
| b | Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) | tersedianya peralatan dan perlengkapan BKB | 50 set | 50 set | 50 set | 7,500,000 | 50 set | 9,000,000 |
| c | Kegiatan Pembinaan Pembantu Petugas Keluarga Berencana (PPKBD) | Meningkatnya ketrampilan Petugas KB Desa | 2,180 | 2,180 | 1,891 | 218,000,000 | 1,891 | 284,600,000 |
| d | Kegiatan Pelatihan Kader Keluarga Berencana Desa | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Kader Keluarga Berencana Desa | 446 orang | 446 orang | 446 orang | 20,000,000 | - | - |
| e | Kegiatan fasilitasi konseling kader keluarga berencana desa | Terlatihnya pengelola & tenaga prog kader | - | - | - | - | 578 orang | 25,000,000 |
| f | Kegiatan Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi kader | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 58,000,000 | 200 orang | 60,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | BKB desa sejumlah 10 orang di 20 kecamatan | | | | | | | |
| | | | 5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | | | | | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | a | . Pertemuan kelompok kegiatan Bina Ekonomi Produktif (UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Kader UPPKS | - | 60 orang | 60 orang | 20,000,000 | 60 orang | 25,000,000 |
| | | | | Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 4% | 4% | | 3% | |
| | | | 1. 'Program Pelayanan Kontrasepsi | | | | | 369,999,890 | 389,999,890 | |
| | | a | . Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB | <i>Terlayannya akseptor Implant dan MOW/MOP</i> | 426 orang | 483 orang | 483 orang | 119,999,890 | 483 orang | 124,999,890 |
| | | b | . Kegiatan Pengadaan Alokant | Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi bagi Calon Peserta KB melalui pembelian implant | 740 set | 740 set | 740 set | 250,000,000 | 740 set | 265,000,000 |
| | | | | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang | 100% | 100% | 100% | | 100% | |
| Mewujudkan Masyarakat Perdamaian | Meningkatkan pemberdayaan | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|------|--|------|--|
| <p>dan Perkotaaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</p> | <p>perempuan, dan perlindungan anak</p> | <p>perlindungan perempuan dan perlindungan anak</p> | <p>Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</p> | | | | | | |
| | | | <p>Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu</p> | 88% | 90% | 100% | | 100% | |
| | | | <p>Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu</p> | 75% | 80% | 85% | | 85% | |
| | | | <p>Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih</p> | 60% | 60% | 70% | | 70 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|----------|---|---|------------|---|------------|
| | | vision (Lemah Penglihatan) | & intensitas belajar anak penderita low vision | | | | | | |
| | | b c. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak | Tersalurkan bantuan untuk peningkatan kegiatan PP dan PA (50 organisasi wanita) | - | 50 organisasi | 50 organisasi | 13,000,000 | 50 organisasi | 20,000,000 |
| | | c b. Fasilitasi Penanganan Korban kekerasan berbasis Gender dan Anak | Berkurangnya trauma psikologis korban kekerasan berbasis Gender dan Anak | 25 orang | sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT | sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT | 10,000,000 | sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT | 15,000,000 |
| Meningkatkan Kesetaraan Gender | Meningkatnya kualitas kabupaten layak anak | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan | 60% | 66% | 70% | | 75% | | |
| | | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengusaha Alternatif | 60% | 60% | 70% | | 70% | | |
| | | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar | 60% | 60% | 70% | | 70% | | |
| | | Cakupan Pencapaian Indikator | 70% | 70% | 75% | | 75% | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|------------|---|---------|
| | | Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | | | | | | |
| | | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus | 55% | 55% | 60% | | 60% | |
| | 1. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak | | | | | 59,552,950 | | 130,000 |
| | a Fasilitasi Kegiatan Forum Anak | Terfasilitasinya program kegiatan forum anak | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 19,892,950 | 1 kegiatan | 50,000 |
| | b Fasilitasi dan advokasi Pengembangan kota layak anak (KLA) | Meningkatnya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Tmg dalam evaluasi KLA TK.Nasiona l | 115 peserta | sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6 | sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6 | 24,660,000 | sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6 | 50,000 |
| | c Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Anak | Meningkatnya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT | <i>Rakor Pokja PUG 25 org, Rakor Pokja GSI 25 org, Rakor KLA 30 org, Monev GSI / RSSIB 2 keg</i> | 20 kecamatan | 20 kecamatan | 15,000,000 | 20 kecamatan | 30,000 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------|----------|------------|------------|--------|
| Meningkatnya kesetaraan gender | | Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender | 4.2 | 29.2 | 30 | | 40 | |
| | 1. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak | | | | | | 38,903,900 | 80,000 |
| | a Advokasi Pelaksanaan ARG di SKPD | Meningkatnya pemahaman penyusunan dokumen ARG di SKPD | <i>advokasi PUG dan PUHA di SKPD bagi 24 org</i> | 6 SKPD | 6 SKPD | 11,999,900 | 6 SKPD | 20,000 |
| | b Pelatihan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender | Meningkatnya kemampuan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif | - | 35 orang | 35 orang | 26,904,000 | 35 orang | 30,000 |
| c Fasilitasi penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG | Terfasilitasinya program ARG dan PUG di pemangku kebijakan di pemerintahan | - | - | - | - | 5 skpd | 30,000 | |

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM BKBPP PENYUSUNAN RENSTRA BKBPP KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra BKBPP yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1..Pemaparan materi :

- a. VISI Kab Temanggung dan Isu Isu Strategis disampaikan oleh Kepala BKBPP Kab Temanggung (Masruchi Skm.M Kes.)
- b. Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang agamis,Berbudaya dan sejahtera disampaikan oleh Kabid PP (Dra. Sri Endang P MSi)
- c. Misi 5 . Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan disampaikan oleh Kabid KB (Ir.Brojosono)
- d. Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih ,Transparan tidak KKN dan berorientasi pada Pelayanan Publik disampaikan oleh sekretaris BKBPP kab Temanggung (Dra.Sri Widji Handayani)

2.. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum BKBPP terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala ,Kabid dan Sekretaris , sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at Tanggal 7 Maret 2014

Jam :10.00 WIB

Tempat :Aula BKBPP Kab Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) BKBPP , tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja BKBPP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT
dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra BKBPP Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 7 Maret 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, Skm. M.Kes

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM BKBP

NOMOR :

TANGGAL : 7 Maret 2014

Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1 | Masruchi Skm M Kes | BKBPP | Kepala | 1. |
| 2 | Dra.Sri Widji Handayani | BKBPP | Sekretaris | 2 |
| 3 | Tri Agus Sutopo SH | BKBPP | Kabid KS | 3 |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------|---------------------|---|
| 4 | Ir.Brojosono | BKBPP | Kabid KBKR | 4 |
| 5 | Johan S hariyadi SH MM | BKBPP | Kabid Data dan Hal | 5 |
| 6 | Dra.Sri Endang P Msi | BKBPP | Kabid PP dan PA | 6 |
| 7 | Endang Diah Ps s sos | BKBPP | Kasubag Perencanaan | 7 |
| 8 | Eky Ekayadi Atmajaya A.Md | BKBPP | Staf Perencanaan | 8 |

Temanggung, 7 Maret 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

Daftar hadir Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Maret 2014

| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Masruchi Skm M Kes | BKBPP | Kepala | 1. |
| 2 | Dra.Sri Widji Handayani | BKBPP | Sekretaris | 2 |
| 3 | Tri Agus Sutopo SH | BKBPP | Kabid KS | 3 |
| 4 | Ir.Brojosono | BKBPP | Kabid KBKR | 4 |
| 5 | Johan S hariyadi SH MM | BKBPP | Kabid Data dan Hal | 5 |
| 6 | Dra.Sri Endang P Msi | BKBPP | Kabid PP dan PA | 6 |
| 7 | Endang Diah Ps s sos | BKBPP | Kasubag Perencanaan | 7 |
| 8 | Eky Ekayadi Atmajaya A.Md | BKBPP | Staf Perencanaan | 8 |

Temanggung, Maret 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

Daftar Hadir Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Januari 2014

| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Masruchi Skm M Kes | BKBPP | Kepala | 1. |
| 2 | Dra.Sri Widji Handayani | BKBPP | Sekretaris | 2 |
| 3 | Tri Agus Sutopo SH | BKBPP | Kabid KS | 3 |
| 4 | Ir.Brojosono | BKBPP | Kabid KBKR | 4 |
| 5 | Johan S hariyadi SH MM | BKBPP | Kabid Data dan Hal | 5 |
| 6 | Dra.Sri Endang P Msi | BKBPP | Kabid PP dan PA | 6 |
| 7 | Endang Diah Ps s sos | BKBPP | Kasubag Perencanaan | 7 |
| 8 | Eky Ekayadi Atmajaya A.Md | BKBPP | Staf Perencanaan | 8 |

Temanggung, Januari 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

Daftar hadir Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : Pebruari 2014

| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Masruchi Skm M Kes | BKBPP | Kepala | 1. |
| 2 | Dra.Sri Widji Handayani | BKBPP | Sekretaris | 2 |
| 3 | Tri Agus Sutopo SH | BKBPP | Kabid KS | 3 |
| 4 | Ir.Brojosono | BKBPP | Kabid KBKR | 4 |
| 5 | Johan S hariyadi SH MM | BKBPP | Kabid Data dan Hal | 5 |
| 6 | Dra.Sri Endang P Msi | BKBPP | Kabid PP dan PA | 6 |
| 7 | Endang Diah Ps s sos | BKBPP | Kasubag Perencanaan | 7 |
| 8 | Eky Ekayadi Atmajaya A.Md | BKBPP | Staf Perencanaan | 8 |

Temanggung, Pebruari 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

Daftar Hadir Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : 7 Maret 2014

| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Masruchi Skm M Kes | BKBPP | Kepala | 1. |
| 2 | Dra.Sri Widji Handayani | BKBPP | Sekretaris | 2 |
| 3 | Tri Agus Sutopo SH | BKBPP | Kabid KS | 3 |
| 4 | Ir.Brojosono | BKBPP | Kabid KBKR | 4 |
| 5 | Johan S hariyadi SH MM | BKBPP | Kabid Data dan Hal | 5 |
| 6 | Dra.Sri Endang P Msi | BKBPP | Kabid PP dan PA | 6 |
| 7 | Endang Diah Ps s sos | BKBPP | Kasubag Perencanaan | 7 |
| 8 | Eky Ekayadi Atmajaya A.Md | BKBPP | Staf Perencanaan | 8 |

Temanggung, 7 Maret 2014
Kepala BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL : 7 Maret 2014

| NO | Nama | Lembaga / instansi | Jabatan / Alamat | Tanda Tangan |
|----|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Masruchi Skm M Kes | BKBPP | Kepala | 1. |
| 2 | Dra.Sri Widji Handayani | BKBPP | Sekretaris | 2 |
| 3 | Tri Agus Sutopo SH | BKBPP | Kabid KS | 3 |
| 4 | Ir.Brojoso | BKBPP | Kabid KBKR | 4 |
| 5 | Johan S hariyadi SH MM | BKBPP | Kabid Data dan Hal | 5 |
| 6 | Dra.Sri Endang P Msi | BKBPP | Kabid PP dan PA | 6 |
| 7 | Endang Diah Ps s sos | BKBPP | Kasubag Perencanaan | 7 |
| 8 | Eky Ekayadi Atmajaya A.Md | BKBPP | Staf Perencanaan | 8 |

Temanggung, 7 Maret 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum KBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM

KOMUNIKASI BKBPP

NOMOR :

TANGGAL : 7 Maret 2014

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum BKBPP terhadap
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra BKBPP Tahun 2013 – 2018
Kabupaten Temanggung
Tanggal : 7 Maret 2014
Tempat : Aula BKBPP Kab Temanggung

| | | |
|---|--|---|
| <p>ISU STRATEGIS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya standart kompetensi seluruh tenaga pengelola program internal dan eksternal sampai ke lini lapangan 2. Belum optimalnya pemerintah kabupaten dalam mendukung peningkatan SDM Pengelola Program KB melalui pelatihan 3. Penelitian dan Pengembangan masih belum dianggap penting 4. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijaksanaan 5. Belum optimalnya kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pusat studi dan lembaga 6. Semakin berkurangnya petugas lini lapangan KB 7. Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan MKJP 8. Belum efektifnya kelembagaan PUG,PUHA,pemberdayaan perempuan , tumbuh kembang anak,KB serta jejaring kerjanya 9. Rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan dan lembaga lembaga pengambilan 10. Lemahnya sistem data dan informasi gender ,anak dan KB | | |
| <p>VISI : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH</p> | | |
| <p>Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;</p> | | |
| Tujuan | Sasaran | Strate |
| Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak | -Meningkatkan keterse informasi gender dan a - Meningkatkan keterca Pemberdayaan peremp perlindungan anak |
| Meningkatkan kesetaraan gender | Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak | .Penguatan kelembaga KLA |
| | Meningkatnya kesetaraan gender | Meningkatkan Prog dan utamaan gender dan ar peningkatan kapasitas |

| | | |
|--|---|--|
| | | kelembagaan masy utk KB dan KS |
| Misi 5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strate |
| Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Keluarga Berencana | Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga | Meningkatkan peran se melalui pemberdayaan |
| | Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana | Meningkatkan kualitas layanan KB melalui per kelembagaan KB |
| Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik. | | |
| Tujuan | Sasaran | Strate |
| Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan Nepotisme | meningkatnya kemampuan , profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur | a. Peningkatan kompete SDM apatur dan peni pengelolaan hukum org laksana b. Pengelolaan keuang dan akuntabel c. Peningkatan fungsi k kwalitaspelayanan adm perkantoran kerumah t |
| Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian , evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah | meningkatnya kualitas perencanaan , pengendalian evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah | a. Peningkatan kwalita program dan anggaran b. Peningkatan fungsi p internal pemerintah unt pemerintah yang baik |

LAMPIRAN VI

| MISI | Tujuan | sasaran | Program/Kegi atan | Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan | Data capaian pada tahun 2012 | T | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------|----|----------------------------|----|
| | | | | | | 2013 (sesuai APBD 2013) | | | sesuai (DPA SKP 2014) | |
| | | | | | | target | prediksi capaian | Rp | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Mewujudkan pemerintahan yang bersih, | Terwujudnya pemerintahan yang | Meningkatnya kemampuan, profesio | | Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------|----------|-------------|------------|----------|--------|
| transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik | bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme | nalisme dan kesejahteraan SDM aparatur | | total belanja langsung SKPD dalam satu tahun | | | | | | | |
| | | | 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran | | | | | 255,796,600 | | 300,2275 | |
| | | | a | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Meningkatnya komunikasi, listrik & air untuk menunjang terselenggaranya kegiatan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 16,992,000 | 12 bulan | 19,990 |
| | | | b | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | terpeliharanya sarana dan prasarana kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 2,000,000 | 12 bulan | 2,300, |
| | | | c | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | terpeliharanya kebersihan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 3,000,000 | 12 bulan | 3,450, |
| | | | d | Penyediaan alat tulis kantor | terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 22,022,100 | 12 bulan | 23,500 |
| | | | e | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | perkantoran terutama barang cetak dan foto copy data | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 8,000,000 | 12 bulan | 9,200, |
| | | | f | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | terpeliharanya alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 2,000,000 | 12 bulan | 2,000, |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|---|-------------|---|-------------|
| | | | g | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan | tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan pegawai | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 1,800,000 | 12 bulan | 2,070, |
| | | | h | Penyediaan makanan & minuman | tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 9,993,500 | 12 bulan | 10,997,000 |
| | | | i | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 39,995,000 | 12 bulan | 42,495,000 |
| | | | j | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah | terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 134,995,000 | 12 bulan | 135,995,000 |
| | | | k | Jasa pelayanan perkantoran | terselenggaranya kegiatan administrasi kantor | 13 bulan | 13 bulan | 13 bulan | 14,999,000 | 13 bulan | 48,216,500 |
| | | | 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | 989,900,000 | | 150,000,000 |
| | | | a | Pembangunan dan rehab Gedung Kantor | tersedianya aula dan garasi | - | 1 Gedung | 1 Gedung | 849,930,000 | - | - |
| | | | b | Pengadaan peralatan gedung kantor | tersedianya peralatan gedung kantor | <i>Terbelinya 4 buah meja kerja dan 1 buah bendera merah putih</i> | terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 59,970,000 | terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 60,000,000 |
| | | | c | Pemeliharaan rutin /berkala gedung | Meningkatnya kenyamanan & | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 10,000,000 | 12 bulan | 15,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|--|--|---|---|---|---|------------|------------|
| | | | kantor | keamanan gedung kantor | | | | | | |
| | | | d | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Meningkatnya mobilitas kelancaran pelaksanaan tugas | Service kendaraan roda 4, 6 kali, Body kit 12 kali, body repair 1 unit, belanja BBM dan perpanjangan STNK 3 Mobil, 96 motor | Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56 | Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56 | 70,000,000 | 75,000,000 |
| | | | 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | | | | | 4,299,900 | 4,944,000 |
| | | | a | Penilaian angka kredit | terfasilitasinya penilaian angka kredit Penyuluh KB | 2 smter | 2 smter | 2 smter | 4,299,900 | 4,944,000 |
| | | | 4. Program peningkatan disiplin aparatur | | | | | | - | 23,000,000 |
| | | | a | Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu | terpenuhinya fasilitas pakaian dinas pegawai | 123 pegawai | - | - | - | 23,000,000 |
| Meningkatkan | Meningkatnya kualitas | | 1. Program perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------|---------|------------|------------|---|------------|
| | kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah | perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah | a. Kegiatan Penyusunan oleh perencanaan SKPD | tersusunnya Lakip, PK, LPPD, AMJ, dan Rekapitulasi data SKPD | - | - | - | - | - | - |
| Mewujudkan budaya sehat dan aksesibilitas kesejahteraan masyarakat | Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui KB | Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga | Meningkatnya kualitas kesejahteraan Keluarga | | | | | | | |
| | | | a. Keluarga Pra Sejahtera | 22.86 | 21.32 | 21.32 | | 21.32 | | |
| | | | b. Keluarga Sejahtera I | 11.3 | 8.05 | 8.05 | | 8.05 | | |
| | | | c. Keluarga Sejahtera II | 17.33 | 21.81 | 21.81 | | 21.81 | | |
| | | | d. Keluarga Sejahtera III | 45.38 | 45.57 | 45.57 | | 45.57 | | |
| | | | e. Keluarga Sejahtera III plus | 3.11 | 3.23 | 3.23 | | 3.23 | - | |
| | | | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan | 100% | 100% | 100% | | 100% | | |
| | | | 1. Program pembinaan kesejahteraan keluarga | | | | | 44,999,000 | | 70,000,000 |
| a. Kegiatan Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan | Tersedianya hasil pendataan 25 buku /th & 24 Buku umpan balik / bulan | 49 buku | 49 buku | 49 buku | 44,999,000 | 49 buku | 70,000,000 | | | |
| | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun | 4% | 3% | 3.25% | | 3.10% | | | | |

| | | | | |
|--|---------|---------|--------|--------|
| Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif | 83,02 % | 84% | 83% | 83.20% |
| Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) | 7,55 % | 7% | 6% | 5.70% |
| Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB | 80,58 % | 80,89 % | 81% | 81.05% |
| Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB | 84,52 % | 84,99 % | 85% | 85.50% |
| Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 5 | 1 : 4 |
| Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria | 2,89 % | 3% | 3% | 3.20% |
| Menurunnya tingkat pertumbuhan | 0,67 % | 0,7 % | 0,67 % | 0.65% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------|---------|---------------|------------|---------------|-------------|
| | penduduk | | | | | | | |
| | Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru | 19428 | 17274 | 14073 | | 14065 | | |
| 1. Program Keluarga Berencana | | | | | 1,249,642,900 | | 1,489,660,000 | |
| a | Kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) | Peningkatan pengetahuan terhadap program KB | 40 Kali | 40 Kali | 40 Kali | 24,850,000 | 40 Kali | 30,000,000 |
| b | Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan | Rapat Koordinasi Kepala UPT Kecamatan, Rakorcam, Rakordes masing-masing 4 kali dan Rakorda 1 kali rapat tengah tahunan | 12 kali | 12 kali | 12 kali | 59,823,000 | 12 kali | 114,900,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------|-----------|
| | | | c | Kegiatan Pengadaan Sarpras KB (DAK) | tersedianya peralatan KB | <i>Terbelinya Implant KIT 4 unit, dan Obgyn bed 4 unit, Komputer 5 unit, KIE KIT 51 unit, sarana kerja PLKB 70 unit</i> | terbelinya tempat sampah 2, almari 10, filling kabinet 4, whiteboard 2, kipas angin 6, komputer 6, software 6, printer 6, meja komputer 6, ups 6, modem 6, meja kerja 14, kursi kerja 150, tabung gas 2, kompor 2, gordin 2, gedung 2 bh, obgyn bed 57, iud kit 58 | terbelinya tempat sampah 2, almari 10, filling kabinet 4, whiteboard 2, kipas angin 6, komputer 6, software 6, printer 6, meja komputer 6, ups 6, modem 6, meja kerja 14, kursi kerja 150, tabung gas 2, kompor 2, gordin 2, gedung 2 bh, komputer | 960,680,000 | 1,017,500 |
|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|-------------|--|---------|
| d | Kegiatan Pendampingan DAK Pengadaan Sarpras KB | tersedianya peralatan KB | <i>Terbelinya Implant KIT 4 unit, dan Obgyn bed 4 unit, Komputer 5 unit, KIE KIT 51 unit, sarana kerja PLKB 70 unit, obgyn bed 57, iud kit 58</i> | iud kit 58, obgyn bed 57, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh | iud kit 58, obgyn bed 57, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh | 124,284,000 | komputer, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh | 139,100 |
| e | Kegiatan Pembangunan balai penyuluhan KB (DAK) | tersedianya UPT KB | 2 unit | - | - | - | - | - |
| f | Kegiatan Pendampingan DAK (Pembangunan balai penyuluhan KB) | tersedianya UPT KB | 2 unit | - | - | - | - | - |
| g | Kegiatan Kegiatan Pertemuan Medis Teknis | terlaksananya kegiatan BKBPP | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,575,000 | 1 Kegiatan | 5,500, |
| h | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KB dan PP | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bagi Pelaksana dan Pengelola Program KB & KR (bidan dan PKB) | 20 upt, 2 kegiatan | 20 upt, 2 kegiatan | 20 upt, 2 kegiatan | 8,999,950 | 20 upt, 2 kegiatan | 9,919, |
| i | Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat | Meningkatnya peserta KB sebanyak | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 23,874,950 | 1 Kegiatan | 29,990 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | at/ Institusi/ Lembaga | 400 akseptor | | | | | | |
| j | Pengembangan dan Pemantauan Program | Meningkatnya pembinaan bagi kelompok catur bina keluarga | 12 kelompok | 12 kelompok | 12 kelompok | 42,556,000 | 12 kelompok | 42,556,000 |
| k | Pembangunan Jaringan online dengan UPT Kecamatan/ SKPD | - Pengadaan peralatan online '- Pelatihan operator | - | - | - | - | - | 99,999,000 |
| 2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR | | | | | | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| a | Kegiatan sosialisasi KRR dan KHIBA | - Meningkatkan pengetahuan tentang KRR bagi PIK Remaja (konselor Sebaya) | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 4,500,000 | 1 Kegiatan | 4,500,000 |
| 3. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS | | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| a | Kegiatan Pertemuan penyuluh penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS | Meningkatnya pengetahuan tentang narkoba, PMS bagi Pelaksana dan Pengelola PIK Remaja dan Pengurus OSIS | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 10,000,000 | 2 Kegiatan | 10,000,000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 4. Program Pengembang an Model Operasional BKB - Posyandu - PADU | | | | | | 303,500,000 | | 378,600,000 |
| a | Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Kelompok BKB | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi kelompok KB | | | | | | |
| b | Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) | tersedianya peralatan dan perlengkapan BKB | 50 set | 50 set | 50 set | 7,500,000 | 50 set | 9,000,000 |
| c | Kegiatan Pembinaan Pembantu Petugas Keluarga Berencana (PPKBD) | Meningkatnya ketrampilan Petugas KB Desa | 2,180 | 2,180 | 1,891 | 218,000,000 | 1,891 | 284,600,000 |
| d | Kegiatan Pelatihan Kader Keluarga Berencana Desa | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Kader Keluarga Berencana Desa | 446 orang | 446 orang | 446 orang | 20,000,000 | - | - |
| e | Kegiatan fasilitasi konseling kader keluarga berencana desa | Terlatihnya pengelola & tenaga prog kader | - | - | - | - | 578 orang | 25,000,000 |
| f | Kegiatan Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi kader | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 58,000,000 | 200 orang | 60,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | BKB desa sejumlah 10 orang di 20 kecamatan | | | | | | | |
| | | | 5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga | | | | | 20,000,000 | 25,000,000 | |
| | | a | Pertemuan kelompok kegiatan Bina Ekonomi Produktif (UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Kader UPPKS | - | 60 orang | 60 orang | 20,000,000 | 60 orang | 25,000,000 |
| | | | | Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 4% | 4% | | 3% | |
| | | | 1. 'Program Pelayanan Kontrasepsi | | | | | 369,999,890 | 389,999,890 | |
| | | a | Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB | <i>Terlayannya akseptor Implant dan MOW/MOP</i> | 426 orang | 483 orang | 483 orang | 119,999,890 | 483 orang | 124,999,890 |
| | | b | Kegiatan Pengadaan Alokant | Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi bagi Calon Peserta KB melalui pembelian implant | 740 set | 740 set | 740 set | 250,000,000 | 740 set | 265,000,000 |
| Mewujudkan Masyarakat Perdamaian | Meningkatkan pemberdayaan | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, | | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang | 100% | 100% | 100% | | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|------|--|------|--|
| <p>dan Perkotaaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</p> | <p>perempuan, dan perlindungan anak</p> | <p>perlindungan perempuan dan perlindungan anak</p> | <p>Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</p> | | | | | | |
| | | | <p>Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu</p> | 88% | 90% | 100% | | 100% | |
| | | | <p>Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu</p> | 75% | 80% | 85% | | 85% | |
| | | | <p>Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih</p> | 60% | 60% | 70% | | 70 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
| | Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan | | | | | | | |
| | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum | 25% | 25% | 25% | | | 25% | |
| | Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 90% | 94% | 98% | | | 98% | |
| | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 80% | 80% | 84% | | | 84 | |
| | Rasio Kekerasan dalam rumah tangga | 40% | 40% | 50% | | | 50% | |
| | | 1 : 2.182 | 1 : 2.401 | 1 : 2.401 | | | 1 : 2.500 | |
| | 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | | | | | 76,562,900 | | 105,000 |
| a | a. Fasilitasi anak low | Meningkatnya kualitas | 200 anak | 200 anak | 200 anak | 53,562,900 | 200 anak | 70,000 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|----------|---|---|------------|---|------------|
| | | vision (Lemah Penglihatan) | & intensitas belajar anak penderita low vision | | | | | | |
| | | b c. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak | Tersalurkan bantuan untuk peningkatan kegiatan PP dan PA (50 organisasi wanita) | - | 50 organisasi | 50 organisasi | 13,000,000 | 50 organisasi | 20,000,000 |
| | | c b. Fasilitasi Penanganan Korban kekerasan berbasis Gender dan Anak | Berkurangnya trauma psikologis korban kekerasan berbasis Gender dan Anak | 25 orang | sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT | sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT | 10,000,000 | sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT | 15,000,000 |
| Meningkatkan Kesetaraan Gender | Meningkatnya kualitas kabupaten layak anak | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan | 60% | 66% | 70% | | 75% | | |
| | | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengusaha Alternatif | 60% | 60% | 70% | | 70% | | |
| | | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar | 60% | 60% | 70% | | 70% | | |
| | | Cakupan Pencapaian Indikator | 70% | 70% | 75% | | 75% | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|------------|---|---------|
| | | Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | | | | | | |
| | | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus | 55% | 55% | 60% | | 60% | |
| | 1. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak | | | | | 59,552,950 | | 130,000 |
| | a Fasilitasi Kegiatan Forum Anak | Terfasilitasinya program kegiatan forum anak | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 19,892,950 | 1 kegiatan | 50,000 |
| | b Fasilitasi dan advokasi Pengembangan kota layak anak (KLA) | Meningkatnya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Tmg dalam evaluasi KLA TK.Nasiona l | 115 peserta | sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6 | sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6 | 24,660,000 | sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6 | 50,000 |
| | c Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Anak | Meningkatnya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT | <i>Rakor Pokja PUG 25 org, Rakor Pokja GSI 25 org, Rakor KLA 30 org, Monev GSI / RSSIB 2 keg</i> | 20 kecamatan | 20 kecamatan | 15,000,000 | 20 kecamatan | 30,000 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------|----------|------------|----------|--------|
| Meningkatnya kesetaraan gender | | Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender | 4.2 | 29.2 | 30 | | 40 | |
| | 1. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak | | | | | 38,903,900 | | 80,000 |
| | a Advokasi Pelaksanaan ARG di SKPD | Meningkatnya pemahaman penyusunan dokumen ARG di SKPD | <i>advokasi PUG dan PUHA di SKPD bagi 24 org</i> | 6 SKPD | 6 SKPD | 11,999,900 | 6 SKPD | 20,000 |
| | b Pelatihan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender | Meningkatnya kemampuan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif | - | 35 orang | 35 orang | 26,904,000 | 35 orang | 30,000 |
| c Fasilitasi penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG | Terfasilitasinya program ARG dan PUG di pemangku kebijakan di pemerintahan | - | - | - | - | 5 skpd | 30,000 | |